



Kunjungan Delegasi *The National Assembly of Vietnam*



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA menerima kunjungan delegasi dari *The National Assembly of Vietnam* yang dipimpin oleh Hon . Mr. Huynh Ngoc Son, Deputy Chairman of the National Assembly.
(bersambung ke hal. 4.....)



Gubernur Lemhannas RI Talkshow di Metro TV

Selasa, (9/7) Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA. bersama Direktur Eksekutif Reform Instit ute, Dr. Yudi Latief tampil sebagai Narasumber dalam Acara **Talkshow Eight Eleven Show** di Stasiun Metro TV, Jakarta.

Talkshow yang disiarkan secara langsung oleh Metro TV ini, mengangkat topik Pancasila dari Masa ke Masa dimana Pancasila sebagai ideologi terbuka, telah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri.

Dalam perbincangan *talkshow* tersebut dibahas bagaimana perjalanan Pancasila pada masa orde lama, orde baru dan masa reformasi kini, ditengah banyaknya anggapan yang muncul jika nilai-nilai Pancasila saat ini meluntur di tengah arus globalisasi.

Selain berkedudukan dan berfungsi sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa, sumber dari segala sumber hukum, jiwa/kepribadian bangsa, cita-cita dan tujuan nasional serta perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI dipersatukan oleh nilai-nilai Pancasila melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Diharapkan di masa kini dan masa yang akan datang, Pancasila dapat terus menjadi sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa, sumber dari segala sumber hukum, dan jiwa/kepribadian bangsa serta menghidupkan kembali fungsi Pancasila sebagai penyaring (*filter*) dalam menghadapi dampak negatif globalisasi.

DAFTAR ISI



2 Gubernur Lemhannas RI
Talkshow di Metro TV



3 Roadshow Wawasan Kebangsaan
"Wilayah Perbatasan dalam
Perspektif Ketahanan Nasional



4 Kunjungan Delegasi *The National
Assembly of Vietnam*



5 Peran Penting KKB guna
Meningkatkan IPM Indonesia



6 Meningkatkan Kapasitas
Kepemimpinan, Perlu Demokrasi
yang Kuat dan Tata Kelola
Pemerintah yang Bersih



7 Masyarakat Perbatasan,
Akan Alami Krisi Identitas
Kebangsaan



8 Seorang Pemimpin Juga Harus
Merupakan Manajer dan
Negarawan



9 Halal Bihalal Jajaran
Lemhannas RI



10 Ulasan Gubernur Lemhannas RI
Atas Pelaporan SSLN PPRA L dan
SSDN PPRA XLIX



11 Upacara Bendera dalam rangka
HUT Kemerdekaan Republik
Indonesia ke-68

REDAKSI

Pengarah :
Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.
Penanggung Jawab :
Brigjen TNI Sahat Aritonang.
Redaktur :
Megawarni Simamora, S.E, M.M.
Penyunting/Editor :
Letkol Caj G.T. Situmorang.
Redaktur Pelaksana :
Bambang Iman Aryanto, S.T., Trias Noverdi, S.S.,
Endah Heliana, S.Sos.
Desain Grafis & Fotografer :
Arianto S.H., Sertu Syafrizal.
Sekretariat :
Linda Purnamasari S.Sos., Gatot, Indah Winarni.
Distribusi :
Letkol Inf. Sumurung, , Lettu Cba Supriyono, Suryadi.
Alamat Redaksi :
Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan
Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110,
Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,
Website <http://www.lemhannas.go.id>

Roadshow Wawasan Kebangsaan “Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Ketahanan Nasional”

Lemhannas RI melalui Biro Humas bekerja sama dengan LPP RRI Pekanbaru dan LPP TVRI Pekanbaru, menyelenggarakan *Roadshow* yang berupa *Talkshow* dan Dialog Wawasan Kebangsaan dengan topik “Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Ketahanan Nasional”, pada hari Selasa, (23/7) di Pekanbaru, Riau.

Dialog ini sendiri disiarkan secara langsung di media lokal yakni LPP RRI Pekanbaru pada hari Selasa (23/7) pukul 10.00 WIB selama 2 jam. Kemudian dilanjutkan pada pukul 15.30 s.d. 17.00 WIB di LPP TVRI Pekanbaru pada hari yang sama pula. Kegiatan ini merupakan dialog terbuka yang melibatkan pejabat berkompeten dari Lemhannas RI, perwakilan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan mahasiswa.

Dalam kegiatan *Roadshow*, hadir narasumber dari Lemhannas RI adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi, S.E., Tenaga Profesional Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.I.P. Sedangkan dari provinsi setempat hadir Wakil Gubernur Riau, Kapolda Riau, Danrem 031/Wirabima, Rektor Universitas Riau, dan Ketua DPRD Prov. Riau.

Talkshow dan Dialog Wawasan Kebangsaan ini diselenggarakan untuk membangun komunikasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat terkait dengan topik yang ada. Jika dilihat secara umum, potret permasalahan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar antara lain adalah, letak yang jauh dari pemerintahan, keterbatasan sarana komunikasi dan transportasi menuju pulau-pulau itu; potensi ekonomi kemaritiman yang belum dikelola secara optimal; tingkat



Foto : Humas Lemhannas

kesejahteraan dan pendidikan penduduk yang masih rendah; ketergantungan kebutuhan sehari-hari pada negara tetangga; sering terjadi berbagai kegiatan *illegal fishing*, *jalur illegal logging*, *illegal trading* dan *illegal trafficking*.

Dalam perspektif ketahanan nasional, wilayah perbatasan bukan hanya sekedar batas fisik maupun non fisik antarnegara, tetapi lebih dari sekedar hal tersebut. Ketahanan nasional yang memiliki 8 (delapan) gatra, 3 (tiga) gatra bersifat statis, yaitu Demografi, Geografi dan Sumber Kekayaan Alam dan 5 (lima) gatra dinamis, yaitu Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan. Jika ditinjau dari delapan gatra ini, wilayah perbatasan harus mencakup penjangaan batas, pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan tersebut guna terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh.

Saat ini, perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan dengan negara lain, ditunjukkan dengan komitmen untuk membangun wilayah tersebut, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.

Diharapkan dengan kegiatan *Roadshow Wawasan Kebangsaan* di LPP RRI Pekanbaru dan LPP TVRI Pekanbaru, dapat tersampainya pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat Riau melalui talkshow dan dialog pejabat Lemhannas RI dengan tokoh daerah setempat. Selain itu, dapat memberikan pemahaman kebangsaan dalam kerangka NKRI sesuai dengan visi dan misi Lemhannas RI, khususnya diseminasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan di tingkat nasional.



Foto : Humas Lemhannas



Kunjungan Delegasi *The National Assembly of Vietnam*

Selasa (23/7), Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA menerima kunjungan delegasi Vietnam dari The National Assembly of Vietnam yang dipimpin oleh Hon . Mr. Huynh Ngoc Son, Deputy Chairman of the National Assembly di Ruang Tamu pimpinan, Gedung Utama Pimpinan, Lemhannas RI, Jakarta.

Delegasi yang berjumlah 8 (delapan) orang ini, melakukan *courtesy call* kepada Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Kepala Biro Kerjasama Settama Lemhannas RI, Laksma TNI Sulistiyanto.

Dalam *courtesy call* tersebut berkembang diskusi yang membahas tentang hubungan kedua negara yaitu anatar Indonesia dan vietnam. Kedua belah pihak menginginkan terjadinya peningkatan kerjasama agar hubungan diplomatik yang selama ini terjalin baik semakin lebih erat antara kedua negara.

Kunjungan ini diakhiri dengan berfoto bersama di depan pelataran Gedung Utama Lemhannas RI.



Peran Penting KKB guna Meningkatkan IPM Indonesia

"Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia Indonesia".



Foto : Humas Lemhannas

Pernyataan inilah yang dikemukakan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D dalam pembekalan materi yang berjudul **"Pengelolaan Kependudukan dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia"**. Materi tersebut disampaikan kepada para peserta Prgogram Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) L Lemhannas RI hari Kamis (25/7), di Gedung Pancagatra Lt. III Timur, Lemhannas RI.

Menurutnya, peran penting tersebut diharapkan dapat memutus "Lingkaran Setan" Kemiskinan (*Poverty Trap*). Berdasarkan data yang dirangkum oleh pihak BKKBN dari Human Development Index (HDI), indeks HDI Indonesia sendiri dalam 2 dekade terakhir mengalami tren positif setiap tahunnya. Pada tahun 1980 HDI Indonesia berada pada 0,422, tahun 1990 HDI Indonesia meningkat menjadi 0,479. Tahun 2000 dan 2010 masing-masing mencapai HDI 0,540 dan 0,620. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2012 yang berada pada posisi 0,629.

Guna meningkatkan IPM, haruslah melihat komponen-komponen dari IPM sendiri seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. "kalau angka kelahiran dapat dikendalikan,

kemungkinan kesempatan menempuh pendidikan lebih tinggi. Melalui pengelolaan angka kematian dapat diturunkan, dan apabila jumlah penduduk dapat dikendalikan, maka kesejahteraan lebih mudah ditingkatkan" ucap kepala BKKBN Prof. Dr. Fasli Jalal, PhD yang baru saja dilantik Juni lalu.

IPM erat kaitannya dengan masalah kependudukan, sedangkan Indonesia sendiri masih memiliki beberapa tantangan kependudukan seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata dan kualitas penduduk yang masih rendah.

Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D yang juga pernah menjabat Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan mengatakan sebagai badan yang juga menaungi aspek kependudukan, BKKBN telah mengambil langkah kebijakan tentang pengarusutamaan isu-isu tentang kependudukan dan revitalisasi program KB. Dengan menggunakan pendekatan siklus hidup diharapkan tujuan dalam mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera dapat tercapai.



Foto : Humas Lemhannas



Foto : Humas Lemhannas

Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan, Perlu Demokrasi yang Kuat dan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih



Sebagai salah satu implementasi atas tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga “*think thank*” pemerintah, Lemhannas RI menyelenggarakan *Roundtable Discussion* tentang “**Penguatan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan guna Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan dalam rangka Ketahanan Nasional**”.

Roundtable discussion yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, diselenggarakan pada hari Selasa (30/7) di Gedung Astagatra Lt. IV Barat Lemhannas RI. Hadir sebagai pembicara adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, Guru Besar Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH, SU, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof. Dr. Amir Santoso, M. Soc. Sc, dan Plt. Deputy Bidang Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN & RB Drs. Rusdianto, M.Sc.

Selain itu hadir pula Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Effendi Ghazali, Ph.D, MPS ID, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yudha AR, Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI Dr. Rosita S. Noor, MA, dan Ketua Labkurtannas Lemhannas RI Prof. Dr. Miyasto, SU sebagai Penanggap.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI melihat bahwa dari berbagai survey terlihat sebagian besar menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap sebagian besar para pemimpin di berbagai tingkatan, baik lokal maupun nasional.

Fenomena krisis kepercayaan tersebut, menurutnya akan berdampak negatif, yang pada akhirnya akan menggerus kapasitas kepemimpinan di mata rakyat. Gubernur Lemhannas RI berpendapat, krisis ini juga dapat terjadi akibat dari proses rekrutmen dan pengkaderan yang kurang mengedepankan

kompetensi kepemimpinan dan kemampuan manajerial.

Realitas yang ada saat ini, aspek kualifikasi kemampuan termarginalkan oleh faktor popularitas, kemampuan finansial dan partai politik pengusung. “Popularitas dan kemampuan finansial lebih menentukan kemenangan dari pada kompetensi. Kenyataan ini tidak relevan dengan hakikat demokrasi yang sebenarnya yakni upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara yang memberikan kebebasan dan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” ucap Gubernur Lemhannas RI.

“Saat inipun sebenarnya pemerintah telah melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah strategis yang mengarah pada perbaikan dari waktu ke waktu. Namun, demi mencapai suatu kapasitas kepemimpinan yang mantap dan kuat, perlu dilakukan langkah terobosan yang cerdas dan strategis, sehingga mampu mempercepat tercapainya tujuan nasional.” lanjutnya.

Gubernur Lemhannas RI berharap *roundtable discussion* yang dilaksanakan dapat dijadikan momentum bagi anak bangsa untuk turut serta memberikan sumbangsih ide dan pemikiran guna memantapkan kapasitas kepemimpinan bangsa. Dengan kapasitas kepemimpinan yang kuat dan mampu berpikir, bersikap dan bertindak secara komprehensif, integral, holistik dan juga sistemik akan dapat mendukung terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh.

Dalam *roundtable discussion* tersebut hadir pula para pejabat Lemhannas RI anatar lain Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Deputy, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional serta undangan lainnya.

Masyarakat Perbatasan, Akan Alami Krisis Identitas Kebangsaan

“Jika kawasan perbatasan tidak segera dikelola secara serius, tentu kedaulatan negara akan menjadi taruhannya.”

Ini yang menjadi keprihatinan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA saat memberikan sambutan dalam acara *Roundtable Discussion* yang diselenggarakan pada hari Rabu, (31/7) di Gedung Astagatra Lt. 4 Barat Lemhannas RI.

Roundtable discussion yang mengangkat topik **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan guna Mendukung Sistem Logistik Nasional dalam rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional”** menghadirkan 4 (empat) orang Pembicara, yaitu, Danguspurla Armabar TNI AL Laksma TNI Amarullah Octavian, SE, M.Sc, DESD, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jossy, P, Moeis, Ph.D, Staf Ahli BNPP Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Sekdirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI Ir. Yusid Toyib, M.Eng. Sc.

Sedangkan Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi, SE, Tenaga Profesional Bidang Strategi Lemhannas RI Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Ass. Staf Khusus Presiden RI Bidang Pembangunan Daerah Prof. M. Mas’ud Said, Ph.D dan Tenaga Profesional Bidang SKA Lemhannas RI Prof. Dadan Umar Daihani hadir sebagai Penanggung.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kawasan yang berbatasan dengan sepuluh negara, baik perbatasan darat maupun laut. Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan kawasan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial serta ekonomi yang masih sangat terbatas.

Bila dibandingkan dengan negara tetangga, kesenjangan infrastruktur di wilayah perbatasan makin nyata.

“Di Malaysia, aksesibilitas telah cukup baik, dimana jalan sudah teraspal dengan baik hingga ke desa-desa”, kata Gubernur Lemhannas RI.

“fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk tingkat desa dan kecamatan juga lebih baik, dengan investasi infrastruktur perkapita yang lebih baik serta fasilitas transportasi dan telekomunikasi yang jauh lebih baik pula”, tambahnya.

Melihat berbagai kendala infrastruktur yang ada di wilayah Indonesia, seperti minimnya akses darat, laut dan udara serta minimnya infrastruktur informasi dan telekomunikasi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketertinggalan ekonomi wilayah perbatasan, bila dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di negara kita.

Gubernur Lemhannas RI mengkhawatirkan jika keterbatasan infrastruktur yang ada, akan menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, sehingga tidak jarang masyarakat di wilayah perbatasan akan mengalami krisis identitas kebangsaan yang dapat mempengaruhi kondisi ketahanan wilayah perbatasan.

Namun, disisi lain menurutnya, butuh strategi kebijakan pengembangan wilayah yang dapat menjamin percepatan pembangunan di seluruh kawasan secara lebih bersinergi.

Oleh karena itu, Gubernur Lemhannas RI menaruh harapan besar akan hasil yang didapat dari *roundtable discussion* tersebut sebagai masukan ataupun gagasan pemikiran yang cerdas untuk penyempurnaan kajian yang dilakukan Lemhannas RI.



Seorang Pemimpin Juga Harus Merupakan Manajer Dan Negarawan



Foto : Humas Lemhannas

Mantan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Muladi, SH, memberikan ceramah kepada para peserta pendidikan Lemhannas RI pada hari Kamis (1/8) di Gedung Trigatra Lt. III Barat Lemhannas RI, Jakarta. Materi yang berjudul **"Kepemimpinan Negarawan (Perpaduan antara Manajer, Pemimpin dan Negarawan) dalam memantapkan Nasionalisme Kultural dan Nilai-Nilai Pancasila"** disampaikan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan XIX Lemhannas RI.

Menurut Prof. Dr. Muladi, SH, di era globalisasi yang bersifat multidimensional dan mengandung aspek positif dan negatif serta sikap pro dan kontra, dibutuhkan bentuk-bentuk kepemimpinan di semua lini yang lebih tangguh, seperti kepemimpinan visioner, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan kewirausahaan, kepemimpinan strategis, kepemimpinan global bahkan kenegarawanan atau *statesmanship*.

"Dalam globalisasi terdapat arus yang tidak terbatas di bidang informasi, pemikiran, nilai kultural, modal, barang dan jasa, teknologi, penyakit, manusia/ migran, senjata, baik legal maupun ilegal lintas batas negara dan manusia" jelasnya lagi.

Dengan berkembangnya kompleksitas permasalahan yang ada dan diwarnai dengan sentuhan terhadap nilai-nilai dan falsafah kemanusiaan yang partikularistik dan universal, maka peranan signifikan seorang manajer yang mungkin sekaligus adalah *"leader"* yang bersifat *"general"* tidak cukup untuk mengatasinya. Oleh karena itu, Prof. Dr. Muladi, SH mengatakan bahwa karakter kenegarawanan sangat diperlukan.

"Hanya saja perlu dicatat bahwa seorang negarawan di samping harus memiliki kepribadian yang khusus, juga harus memiliki *"political attachments"* baik karena jabatan politiknya maupun karena kesadaran dan perhatiannya terhadap masalah-masalah politik besar, yang menyangkut harkat dan martabat manusia, baik langsung maupun tidak langsung" lanjutnya.

Menurut Prof. Dr. Muladi, SH, postur Negarawan Indonesia mencakup 14 (empatbelas) kriteria, yaitu: Memiliki karakter nasional bangsanya secara mendasar yang berakar pada ideologi, konstitusi dan konsensus dasar nasional; Mampu menjadi kekuatan penggerak demokratisasi; Menghayati indeks kepemimpinan dan kenegarawanan yang unggul; Sadar dan waspada terhadap bahaya keamanan yang bersifat komprehensif; Selalu peka terhadap dinamika lingkungan strategis; Mampu berfikir obyektif, kritis, profesional, komprehensif-integral dan sistemik; Mampu bekerja sama dan berpikir serta bertindak lintas disiplin dan lintas sektoral dalam pengambilan keputusan; Melihat globalisasi sebagai peluang dan kesempatan dengan pendekatan transformasionalis; Melihat tujuan nasional dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; Selalu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran intelektual; Selalu beranggapan bahwa kemajuan sains dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama merupakan kunci peradaban bangsa; Selalu menghayati dan berusaha meningkatkan daya saing bangsa; Selalu taat hukum (nasional dan internasional) dan melihat kedaulatan negara di samping merupakan *privilege & control* juga merupakan tanggungjawab (*responsibility*) internal dan eksternal; Dan selalu menghayati pilar-pilar sejarah bangsa.

Sebagai bangsa yang ekstrapluralistik yang harus terus dipupuk dan dikembangkan adalah nasionalisme kultural atau nasionalisme konstruktif. Oleh karena itu, menjadi pemimpin di tingkat nasional, selain merupakan anugerah Tuhan YME, juga merupakan tugas sangat berat karena beban moral (*moral burden*) bahwa jutaan orang nasibnya tergantung pada seorang pemimpin dan sistem organisasi yang dipimpinnya. Terlebih lagi di era globalisasi yang bersifat multidimensi, seorang pemimpin sekaligus juga harus merupakan seorang manajer dan berusaha menghayati nilai-nilai kenegarawanan sebagai *"common standard of achievement"* dan menguasai dan memiliki prinsip-prinsip *geoleadership* nasional.

Halal Bihalal Jajaran Lemhannas RI



Foto: Humas Lemhannas



Foto: Humas Lemhannas

Tepat pada hari pertama setelah libur cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, Senin (12/8), Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, melaksanakan Halal Bihalal dengan seluruh anggota Lemhannas RI di Halaman Tengah Lemhannas RI.

Acara Halal Bihalal tersebut dilaksanakan usai melaksanakan Apel Khusus yang juga dihadiri oleh peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XIX, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX dan PPRA L Lemhannas RI.

Halal Bihalal sendiri merupakan tradisi yang sejak lama sudah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pengertian yang lebih luas, Halal Bihalal adalah acara maaf-memaafkan pada hari Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran usai umat Islam melaksanakan Puasa sebulan penuh pada bulan Ramadhan.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI mewakili segenap pimpinan dan sebagai pribadi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Tahun 1434 H, Mohon Maaf Lahir Bathin. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pejabat dan anggota Lemhannas RI yang telah mendedikasikan dirinya guna kemajuan Lemhannas RI.

Pelaksanaan Halal Bihalal ini dilakukan dengan saling berjabat tangan dan maaf-memaafkan antara Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA yang didampingi oleh Ny. Herawati Budi Susilo Soepandji dengan segenap pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI, para Peserta PPSA XIX, PPRA XLIX, dan PPRA L serta seluruh anggota Lemhannas RI. Acara Halal Bihalal ini diakhiri dengan ramah tamah.



Foto: Humas Lemhannas

Ulasan Gubernur Lemhannas RI Atas Pelaporan SSLN PPRA L dan SSDN PPRA XLIX

U sai pelaksanaan kegiatan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) L Lemhannas RI pada tanggal 23-25 Juli 2013 dan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA XLIX Lemhannas RI pada tanggal 13-20 Juli 2013, Gubernur Lemhannas RI memberikan ulasan singkat atas laporan SSLN dan SSDN masing-masing tujuan negara dan daerah yang telah dilaksanakan.

Ulasan Singkat SSLN PPRA L Lemhannas RI

Sesuai dengan tema pendidikan yang diangkat **“Rekrutmen Pimpinan Tingkat Nasional guna Percepatan Pembangunan Nasional”**, pelaksanaan SSLN yang mengunjungi 3 (tiga) negara tujuan seperti Yordania, Turki dan Korea Selatan telah mengumpulkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan industri strategis terkait dengan tema pendidikan.



Foto : Humas Lemhannas

Berdasarkan laporan yang dikemukakan oleh ketiga rombongan SSLN pada tanggal 29 Juli 2013, Gubernur Lemhannas RI melihat selama kunjungan di Yordania peserta PPRA L Lemhannas RI mendapat respon yang baik oleh media setempat. Di negara ini, Tenaga Kerja Indonesia cukup dihormati keberadaannya, dalam bidang kerjasama kedua negara perlu adanya peningkatan dalam sektor pendidikan seperti pertukaran mahasiswa, di bidang ekonomi perlu memperluas kerjasama di sektor UMKM, sementara itu, di bidang pertahanan keamanan perlu peningkatan kerjasama dalam produksi Alutsista.

Sementara, dalam kunjungan di negara Turki, Gubernur Lemhannas RI, menggarisbawahi kerjasama riset dan teknologi dalam mendukung peningkatan fabrikasi Alutsista. Kerjasama di sektor perekonomian dan pariwisata kedua negara juga perlu ditingkatkan. Sedangkan di negara Korea Selatan, hubungan ekonomi Indonesia - Korea Selatan menunjukkan adanya peningkatan, tak hanya itu, peningkatan kerjasama di sektor pendidikan, industri, pertahanan dan teknologi juga perlu diperhatikan. Selain itu, hal yang perlu disikapi adalah bagaimana Korea Selatan telah berhasil menjaga kestabilan

politik di kawasan semenanjung korea.

Menutup ulasannya, Gubernur Lemhannas RI menyimpulkan bahwa geopolitik masing-masing negara dan pengaruhnya terhadap geopolitik Indonesia perlu diamati terus menerus dan diantisipasi sesuai dengan kajian geostrateginya.

Ulasan Singkat SSDN PPRA XLIX Lemhannas RI

Dengan mengusung tema **“Peran Pendidikan dalam membangun Daya Saing Bangsa”**, SSDN PPRA XLIX melakukan kunjungan yang terbagi dalam tiga rombongan ke tiga daerah seperti Provinsi Bengkulu, Provinsi Riau, dan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menggali data dan informasi yang dibutuhkan guna pelaporan hasil SSDN dihadapan Gubernur Lemhannas RI pada tanggal 12-13 Agustus 2013.

Berdasarkan laporan dari masing-masing ketiga rombongan tersebut, Lembaga sangat mengapresiasi, karena para peserta telah mampu mengukur indikator Ketahanan Nasional di masing-masing daerah dengan berdiskusi dengan narasumber, menentukan Gatra dan Variabel (bobot+skor) dan membandingkan kesesuaiannya dengan Labkurtannas, serta menetapkan indeks Ketahanan Nasional di daerah secara keilmuan dan validasi hasil Labkurtannas Lemhannas

Gubernur Lemhannas RI melihat kebenaran falsafah Pancasila yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Gubernur Lemhannas RI juga melihat banyak kasus masalah fisik dan non fisik dapat diselesaikan secara dialog dan gotong-royong. Sebagai calon pemimpin, diharapkan untuk dapat melihat potensi dan ancaman suatu daerah ditinjau dari Ketahanan Nasional (Geografi, Demografi, SKA) dan (Ideologi, Politik, Ekonomi, Budaya, dan Hankam).

Selain itu, diharapkan para peserta dapat meyiapkan diri dan menentukan apa yang dapat disumbangkan untuk bangsa dan negara yang bercorak Bhinneka Tunggal Ika dan juga melakukan tukar pikiran dengan peserta negara sahabat apa yang bisa dikerjasamakan untuk 5 s/d 10 tahun yang akan datang.



Foto : Humas Lemhannas

Upacara Bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68



Sabtu, (17/8), Lemhannas RI melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman tengah Lemhannas RI. Upacara ini diikuti oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Deputi, Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji, Tenaga Profesional, para Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh personel Lemhannas RI. Upacara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA selaku Inspektur Upacara.

Tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tahun 2013 ini adalah "Mari Kita Jaga Stabilitas Politik Dan Pertumbuhan Ekonomi Kita Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat". Tema ini sangat relevan dengan situasi dan kondisi bangsa yang terkait dengan transisi kepemimpinan nasional pada tahun 2014 mendatang dan tuntutan peningkatan kesejahteraan rakyat yang semakin mengemuka.

Memaknai tema tersebut, Gubernur Lemhannas RI dalam amanatnya, mengajak seluruh jajaran Lemhannas RI untuk menerjemahkan pokok pikiran yang terdapat dalam tema ke dalam berbagai program dan kegiatan masing-masing unit kerja, sehingga dapat menjadi stimulus bagi peningkatan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

"Perlu disadari, bahwa karya nyata Lemhannas RI dalam menyiapkan kader dan pematapan pimpinan tingkat nasional, melakukan kajian strategis dan pematapan nilai-nilai kebangsaan merupakan bukti dedikasi kita kepada ibu pertiwi, sebagai abdi negara yang tidak akan pernah berhenti berkarya menjaga keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia." ucap Gubernur Lemhannas RI.

Tidak hanya itu, Gubernur Lemhannas RI juga menghimbau agar para personel Lemhannas RI dapat berpartisipasi aktif dan sedapat mungkin berupaya memberikan ide-ide kreatif dalam kegiatan peringatan hari ulang tahun di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Partisipasi para personel Lemhannas RI dalam berbagai kegiatan yang bernafaskan kecintaan kepada nusa dan bangsa, bukan saja berguna untuk memelihara jiwa nasionalisme bagi diri sendiri, tetapi sekaligus juga memancarkan semangat yang sama kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Menutup amanatnya Gubernur Lemhannas RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia.

Turut Hadir dalam Upacara tersebut para peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XIX, peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX dan PPRA L Lemhannas RI.



**Keluarga Besar Lemhannas RI
Mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 H
Mohon Maaf Lahir dan Batin
dan**

**Dirgahayu Kemerdekaan
Republik Indonesia ke-68**

